



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor Penyebab Amerika Serikat Tidak Melakukan
Intervensi Militer di Venezuela

Skripsi

Oleh

Grace Tiffani Hadikoesoemo

2017330023

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN-PT NO:3095/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019

Faktor Penyebab Amerika Serikat Tidak Melakukan
Intervensi Militer di Venezuela

Skripsi

Oleh

Grace Tiffani Hadikoesoemo

2017330023

Pembimbing

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si.

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Grace Tiffani Hadikoesoemo

NPM : 2017330023

Judul : Faktor Penyebab Amerika Serikat Tidak Melakukan Intervensi Militer di Venezuela

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Pada, Jumat 22 Januari 2021

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Vrameswari Omega Wati, S.IP., M.Si (Han) : _____

Sekretaris

Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si : _____

Anggota

Idil Syawfi, S.IP., M.Si : _____

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si

Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Grace Tiffani Hadikoesoemo

NPM : 2017330023

Prodi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul : Faktor Penyebab Amerika Serikat Tidak Melakukan Intervensi Militer di Venezuela

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik tertentu oleh pihak lain. Adapun karya dan pendapat dari pihak lain dikutip dan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan akademik yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan rasa tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi yang sesuai jika di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 28 Januari 2021



Grace Tiffani Hadikoesoemo

2017330023

ABSTRAK

Nama : Grace Tiffani Hadikoesoemo

NPM : 2017330023

Judul : Faktor Penyebab Amerika Serikat Tidak Melakukan Intervensi Militer di Venezuela

Krisis kemanusiaan yang ditandai dengan kehancuran ekonomi dan sistem pemerintahan yang semakin menjauh dari praktik demokrasi di Venezuela menjadi perhatian dunia internasional, terutama Amerika Serikat sebagai pelindung Dunia Barat. Penelitian ini ingin menjelaskan alasan Amerika Serikat dalam menanggapi situasi tersebut tidak menggunakan intervensi militer sebagaimana yang biasa terjadi dalam beberapa abad di Amerika Latin. Dengan menggunakan konsep krisis, peneliti menjelaskan kondisi krisis lebih terperinci mencakup aspek politik, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, dengan kerangka teori Mazhab Inggris oleh Hedley Bull dan Martin Wight, peneliti menyimpulkan bahwa dorongan untuk menggunakan cara-cara non-militer terhadap Venezuela tidak hanya berasal dari faktor internal dari AS sendiri tetapi juga faktor eksternal yaitu dinamika di kawasan Amerika Latin. AS berusaha menyeimbangkan kepentingannya dengan relasi bersama negara-negara Amerika Latin melalui penegakan prinsip non-intervensi militer dan kedaulatan.

Kata Kunci: Krisis, Intervensi Militer, AS, Venezuela

ABSTRACT

Name: Grace Tiffani Hadikoesoemo

NPM : 2017330023

Title : Factors That Cause United States Avoid Military Intervention Towards Venezuela

Humanitarian crisis in Venezuela marked by economic down-turn and undemocratic practices in the political system have received international attention, especially from The United States as the protector of Western Hemisphere. However, the steps taken by the US toward Venezuelan crisis are far from the usual mechanism taken toward Latin America countries decades ago. US become more reluctant to use military intervention in Venezuelan case. This paper then questioning the reason why the US avoid military intervention in solving Venezuelan crisis. The author use the concept of crisis in order to identify Venezuela's crisis including political, economic, and social aspect. For the next section, analysis is conducted using the framework of English School Theory by Hedley Bull and Martin Wight. This paper found that what affects US policy in Venezuela not just its internal affairs but also the dynamics of the Americas itself. US is trying to balance its influence and power in the region, yet maintain good relations with other countries through implementation of non-intervention principle arranged to avoid the use of force.

Keywords: Crisis, Non-intervention, US, Venezuela

Kata Pengantar

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kehendak-Nya, skripsi yang berjudul “Faktor Penyebab AS Tidak Melakukan Intervensi Militer di Venezuela” dapat selesai dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang diharapkan. Penulisan skripsi ini dibuat selain untuk memenuhi syarat lulus jenjang akademik sarjana Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan diharapkan juga dapat mendukung penelitian-penelitian dengan topik yang serupa. Secara khusus, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. I Nyoman Sudira, Drs., M.Si selaku pembimbing saya yang banyak memberikan saran serta dukungan selama proses penulisan. Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan yang sudah memfasilitasi pembuatan skripsi ini serta teman-teman mahasiswa bimbingan Mas Nyoman, Grace Angel, Aurelia Miranda, Jeneva Tristinova, dan Kiki Novianty yang sudah memberi dukungan penulis selama proses bimbingan dan penulisan. Saya memahami karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saya memohon maaf jika masih ada kekurangan dan terbuka terhadap kritik atau saran yang membuat penelitian ini menjadi lebih baik. Terima Kasih.

Daftar Isi

Tanda Pengesahan Skripsi.....	I
Pernyataan.....	II
Abstrak.....	III
<i>Abstract</i>	IV
Kata Pengantar.....	V
Daftar Isi.....	VI
Daftar Singkatan.....	VIII
Daftar Bagan.....	IX
BAB I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	
1.2.1 Deskripsi Masalah.....	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Pertanyaan Penelitian.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kajian Literatur.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data	
1.6.1 Metode Penelitian.....	18
1.6.2 Teknik Pengumpulan Data.....	20
1.7 Sistematika Pembahasan.....	21
BAB 2 Krisis Kemanusiaan di Venezuela dan Posisi Serta Tanggapan AS Terhadap Situasi Domestik Venezuela.....	23
2.1 Krisis Humanitarian di Venezuela	

2.1.1 Instabilitas Politik: Penyalahgunaan Konstitusi dan Kekuasaan Dalam Pemerintahan.....	24
2.1.2 Intrusi Sistem Ekonomi: Inflasi dan Ketidakseimbangan Produksi-Konsumsi Dalam Perdagangan.....	30
2.1.3 Krisis Sosial Sebagai Dampak Situasi Krisis Politik dan Ekonomi.....	35
2.2 Posisi Serta Tanggapan AS Terhadap Situasi Domestik Venezuela.....	40
BAB 3 Faktor Penyebab AS Tidak Melakukan Intervensi Militer ke Venezuela.	51
3.1 Amerika Latin: Keinginan Bebas dari AS <i>Versus</i> Kebutuhan Terhadap AS...51	
3.2 Adanya Penguatan Prinsip Non-Intervensi, Otonomi, dan Kedaulatan Negara.	58
3.3 Perubahan Dinamika Kawasan Mendorong Perubahan Sikap AS Terhadap Amerika Latin dan <i>Great Powers</i> Lainnya.....	64
BAB 4 Kesimpulan.....	68
Daftar Pustaka.....	70

Daftar Singkatan

ALBA : *Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra America / Bolivarian Alliance for the Americas*

AS : Amerika Serikat
BaCrim : *Bandas Criminales / Criminal Bands*

CELAC : *The Community of Latin America and Caribbean States*

CIA : *Central Intelligence Agency*

GDP : *Gross Domestic Product*

IMF : *International Monetary Fund*

LAFTA : *The Latin American Free Trade Association*

Mercosur : *Mercado Comun del Sur / Common Market of the South*

MUD : *Mesa de la Unidad Democratica / Democratic Unity Roundtable*

NED : *National Endowment for Democracy*

OAS : *Organization of American States*

OPEC : *Organization of the Petroleum Exporting Countries*

PAHO : *Pan American Health Organization*

PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa

PDVSA : *Petroleos de Venezuela, S.A / Petroleum of Venezuela*

PSUV : *Partido Socialista Unido de Venezuela / United Socialist Party of Venezuela*

UNASUR: *Union of South American Nations*

UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*

USAID : *United States Agency for International Development*

WTO : *World Trade Organization*

Daftar Bagan

3.1 Bagan Destinasi Impor dan Ekspor Negara-Negara Amerika Latin.....54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Stabilitas kawasan Amerika Latin adalah hal yang penting bagi AS, oleh karena itu intervensi militer adalah hal yang biasa terjadi. Jika suatu negara di Amerika Latin mengalami ketidakstabilan, AS merasa memiliki kewajiban untuk langsung melakukan tindakan intervensi sebelum situasi tersebut menyebar ke negara lain. Intervensi yang dilakukan banyak berpengaruh dalam bidang politik dan pemerintahan.¹ Tercatat dari tahun 1898 hingga 1944 ada 41 intervensi yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah di Amerika Latin dan angka tersebut belum termasuk intervensi yang gagal. Dari 41 intervensi, 17 diantaranya melibatkan militer secara langsung yaitu menempatkan personel militer dan persenjataannya di wilayah negara lain.² Sementara itu, paska Perang Dunia II, AS juga melancarkan intervensi militer di banyak negara diantaranya Chile, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Panama, Haiti, Republik Dominika, dan Kuba.³

¹ Clayton L. Thyne, "Supporter of Stability or Agent of Agitation? The Effect of US Foreign Policy on Coups in Latin America, 1960-99", *Journal of Peace Research* Vol. 47 No.4 (2010): 452-455, diakses pada 2 Februari 2020, doi: 10.1177/0022343310368350.

² John C. Coatsworth, "US Foreign Policy Towards Latin America and the Caribbean: United States Interventions", *ReVista, Harvard Review of Latin America* Volume IV no. 2 (2005): 6-8, diakses pada 6 Agustus 2020.

³ Jorge I. Dominiguez, "US-Latin American Relations During the Cold War and Its Aftermath" dalam buku *The United States and Latin America: The New Agenda* Ed. Victor Bulmer-Thomas dan James Dunkerley, Cambridge/London: Institute of Latin American Studies University of London dan David Rockefeller Center for Latin American Studies, 1999, 33-49. Diakses pada 5 Januari 2021.

Sebagian besar intervensi militer ditujukan untuk menggulingkan pemerintahan di Amerika Latin yang tidak kooperatif.⁴ AS sendiri tidak memiliki hubungan yang cukup baik dengan beberapa negara di Amerika Latin seperti Kuba dan Venezuela akibat tingginya pengaruh sosialis di kedua negara. Hal tersebut juga dipicu adanya propaganda anti neo-liberalisme dan anti AS. Selain merupakan reaksi dari adanya distabilitas dan kedekatan geografis, kebijakan luar negeri ditujukan pula untuk membendung karakteristik negara-negara Amerika Latin yang pro terhadap sosialis dan sulit dikontrol.⁵ Diperlukan usaha untuk menahan negara-negara tersebut supaya tidak menyebarkan kepada satu sama lain doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan demokrasi dan tujuan AS di kawasan.

Dari sekian banyak intervensi yang dilakukan terhadap Amerika Latin, intervensi yang cukup kontroversial adalah intervensi yang dilakukan ketika Elliott Abrams menjabat sebagai Asisten Menteri Luar Negeri untuk Isu Hak Asasi Manusia pada pemerintahan Presiden Ronald W. Reagan.⁶ Selama masa jabatannya, AS terlibat isu pelanggaran hak asasi manusia di negara Nicaragua, Guatemala dan El Salvador. Dalam kasus Nicaragua, Elliott Abrams menjadi salah satu tokoh yang terlibat dalam kudeta Presiden Sandinista pada tahun 1980-1981.⁷ Sementara itu, AS juga mendukung pemerintahan Efraim Rios Montt di Guatemala dalam kampanye *counterinsurgency* untuk melawan gerilyawan di

⁴ Coatsworth, *United States*, 6-8.

⁵ Karen L. Remmer, "The Rise of Leftist-Populist Government in Latin America: The Roots of Electoral Change", *Comparative Political Studies* (2011): 949, diakses pada 2 Februari 2020, doi: 10.1177/0010414011428595

⁶ "El Salvador – The Massacre of El Mozote: The Need to Remember", *Human Rights Watch Report Vol. IV Issue No. 2* (March 4, 1992)

⁷ Timothy Alexander Guzman, "The CIA's Dirty War in Nicaragua", *Global Research Website*, diperbarui pada 24 April 2018, <https://www.globalresearch.ca/the-cias-dirty-war-in-nicaragua/5629008>

pihak oposisi dan mengembalikan kontrol pemerintahan seutuhnya.⁸ Kasus berikutnya yang juga menjadi sorotan banyak pihak adalah isu genosida di desa El Mozote, El Salvador pada tahun 1981. Akibat dari dukungan AS tersebut terjadilah pembunuhan massal tidak hanya dari para gerilyawan tetapi juga masyarakat lokal El Mozote.⁹

1.2 Identifikasi Masalah

1.2.1 Deskripsi Masalah

Venezuela pada awal pemerintahan Hugo Chavez adalah negara yang cukup kuat dan berpengaruh di kawasan, namun hal tersebut tidak berlaku setelah Beliau meninggal pada tahun 2013. Kondisi perekonomian Venezuela semakin memburuk dan kini kondisi politik dan sosial pun turut berada pada kondisi yang tidak stabil. Nicholas Maduro sebagai pengganti Chavez, dinilai masyarakat sebagai penyebab semua ketidakstabilan tersebut. Maduro memperoleh jabatan sebagai presiden pertama kali pada tahun 2013, setelah sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden pada pemerintahan Chavez. Maduro secara tidak terduga kembali memenangkan pemilihan umum di Venezuela tahun 2018 melalui proses yang dilingkupi monopoli dan hasilnya dinilai bias.¹⁰

Krisis yang terjadi di Venezuela telah mencakup 3 bidang sekaligus yaitu politik, ekonomi, dan sosial. Krisis politik terjadi akibat tindakan rezim Nicholas Maduro yang semakin mengarah pada otoritarianisme. Respon pemerintah

⁸ “Creating Desolation and Calling It Peace; May 1983 Supplement to the Report of Human Rights in Guatemala”, *Americas Watch Report* (1983): 1-48.

⁹ “El Salvador – The Massacre of El Mozote: The Need to Remember”, *Human Rights Watch Report Vol. IV Issue No. 2* (March 4, 1992)

¹⁰ Jennifer L. McCoy, “Venezuela: An Unstable Equilibrium”, *Revista De Ciencia Politica Vol. 39 No. 2* (2019): 398-400, diakses pada 15 Februari 2020

terhadap permasalahan ekonomi serta sosial yang terjadi di Venezuela disorot oleh berbagai aktor di lingkup internasional karena bertolak belakang dengan praktik-praktik demokrasi. Kritikan pihak oposisi dan aksi demonstrasi di kalangan masyarakat selalu berakhir dengan kekerasan dan penangkapan oleh aparat pemerintah.¹¹ Krisis ekonomi juga terjadi akibat jatuhnya pendapatan minyak mentah Venezuela yang menjadi tulang punggung negara. Penurunan tersebut belum lagi diperparah oleh tingkat inflasi yang mencapai ratusan persen,¹² bahkan diprediksi akan mencapai 15.000% pada akhir tahun 2020.¹³ Kondisi politik serta ekonomi tersebut berdampak pula pada situasi sosial masyarakat Venezuela. Kelangkaan bahan kebutuhan pokok serta minimnya usaha pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut membuat tingkat kejahatan, kelaparan serta terhambatnya proses pemulihan sebab pemerintah tidak transparan dan menutupi fakta-fakta yang terjadi di Venezuela.¹⁴

Menanggapi situasi tersebut, AS mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap Venezuela. Kebijakan tersebut diantaranya pemberian sanksi ekonomi bagi PDVSA dan melarang *Citgo Petroleum Corps* yaitu perusahaan minyak di AS mitra PDVSA untuk tidak memberikan arus dana kepada pemerintah karena dugaan penyalahgunaan dana oleh rezim Maduro.¹⁵ Selain itu, pidato Trump

¹¹ Patrick Duddy, "Political Crisis in Venezuela", *Contingency Planning Memorandum Update, Centre for Preventive Action Council on Foreign Relations* (2015): 2-3, diakses pada 25 Januari 2021.

¹² Barry Cannon dan John Brown, "Venezuela 2016: The Year Of Living Dangerously", *Revista de Ciencia Política, vol. 37, núm. 2* (2017): 615-616, diakses pada 25 Januari 2021.

¹³ "Republica Bolivariana De Venezuela", *IMF Website*, diakses pada 2 Juli 2020, <https://www.imf.org/en/Countries/VEN>

¹⁴ Cannon, *Venezuela 2016*, 615-616.

¹⁵ Fabiola Zerpa dan Hannah Recht, "Venezuela's Choking Points: Here'e Where Maduro Gets His Revenue", *Bloomberg Online*, diperbarui pada 29 Januari,

dalam *Multilateral Meeting on the Bolivarian Republic of Venezuela* menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan isolasi terhadap rezim Maduro dengan menahan visa 700 orang Venezuela termasuk 107 diplomat dan pembekuan aset.¹⁶ Langkah lain yang dilakukan adalah dengan mengakui Juan Guaido sebagai Presiden Interim Venezuela. Pengakuan terhadap Guaido mengurangi legitimasi Maduro di kawasan bahkan juga di dunia internasional dan hubungan diplomatik akan difokuskan melalui Guaido dibanding dengan Maduro.¹⁷

Kebijakan yang paling kontroversial adalah penunjukan Elliott Abrams sebagai *special envoy* Amerika Serikat terhadap Venezuela pada Januari 2019 lalu. Nama Elliott Abrams sudah lama tak muncul dalam aktivitas luar negeri Amerika Serikat sebelum pada Januari 2019 lalu, Trump mengangkat Abrams sebagai *special envoy* AS untuk Venezuela. Penempatan Abrams di Venezuela membawa spekulasi bahwa akan terjadi intervensi militer dan politik seperti yang umumnya terjadi di Amerika Latin beberapa dekade yang lalu. Spekulasi tersebut dibuat dengan melihat kondisi Venezuela saat ini yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan mengingat karakter rezim Maduro yang kurang bersahabat terhadap AS. Ketidakstabilan dalam negeri Venezuela tersebut memang benar mengundang perhatian AS sebagai hegemon dan tetangga dekat di kawasan. Meski begitu, dalam menghadapi kasus Venezuela ini, kebiasaan AS menggunakan intervensi militer justru tidak terlihat. AS sendiri cenderung

2019 ,<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-29/venezuela-s-choking-points-here-s-where-maduro-gets-his-revenue>

¹⁶ “Remarks By President Trump in A Multilateral Meeting on the Bolivarian Republic of Venezuela (New York, NY)”, *United State Foreign Policy Statement*, dipublikasikan pada 25 September 2019.

¹⁷ “U.S. Government Support for the Democratic Aspirations of the Venezuelan People”, *Bureau of Western Hemisphere Affairs, United State Department of State Website*, diakses pada Minggu, 1 Desember 2019.

mengambil pendekatan-pendekatan non-militer. Kebijakan tersebut berbeda dengan apa yang terjadi beberapa dekade lalu. Juan Guaido sempat membenarkan adanya peluang untuk meminta bantuan militer dari AS,¹⁸ namun tampaknya tidak ada bantuan yang datang selain kebutuhan pokok masyarakat dan suntikan dana.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada penyebab Amerika Serikat (AS) tidak melakukan intervensi militer di Venezuela. Penelitian dilakukan dengan pertama-tama melihat situasi krisis yang terjadi di Venezuela dan dinamika hubungan antara AS-Venezuela. Kemudian analisis dilakukan dengan melihat situasi kawasan dan pemahaman tentang nilai tertentu yang memengaruhi dinamika di kawasan dan kepentingan AS di dalamnya. Penelitian ini sebagian besar menggunakan literatur dari tahun 2010 karena mulai tahun tersebut banyak data dan artikel mengandung informasi tentang pemerintahan Maduro dan menyinggung juga pemerintahan Chavez yang mana masih memiliki pengaruh terhadap relasi AS-Venezuela saat ini.

1.2.3 Pertanyaan Penelitian

Apa saja faktor-faktor yang membuat AS tidak menggunakan intervensi militer dalam penyelesaian krisis politik, ekonomi, dan sosial di Venezuela?

¹⁸ Julian Borger, "Venezuela: Opposition Leader Juan Guaido Asks US Military for 'Strategic Planning' Help", *The Guardian*, diperbarui pada 13 Mei 2019, <https://www.theguardian.com/world/2019/may/13/venezuela-news-latest-guaido-us-military-help-maduro>

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menggambarkan faktor-faktor penyebab AS tidak menggunakan intervensi militer dalam menyelesaikan krisis politik, ekonomi, dan sosial di Venezuela.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1.3.2.1 Penelitian ini diharapkan memperluas wawasan pembaca tentang isu dan dinamika hubungan internasional di Amerika Latin khususnya menyangkut hubungan kawasan dengan Amerika Serikat.

1.3.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memahami alasan Amerika Serikat tidak menggunakan cara militer dalam menanggapi kondisi krisis di Venezuela.

1.3.2.3 Penelitian ini diharapkan mendukung penelitian-penelitian dengan topik yang sama.

1.4 Kajian Literatur

Untuk mendukung proses penelitian, penulis mengaji dan membandingkan beberapa literatur yang juga melakukan penelitian pada topik yang serupa diantaranya *How Foreign Pressure Affects Mass Mobilization in Favor of Authoritarian Regimes* oleh Sebastian Hellmeier. Dalam literatur tersebut, Hellmeier menganalisis dampak tekanan internasional terhadap

perkembangan rezim otoriter di suatu negara termasuk salah satunya tekanan berupa sanksi ekonomi dan diplomatik. Pendapat utama penelitian tersebut adalah semakin keras dan banyak sanksi atau tekanan eksternal yang diberikan terhadap suatu pemerintahan negara, justru semakin kuat kedudukan serta dukungan yang didapat oleh rezim otoriter tersebut. Berdasarkan data yang tertulis dalam penelitian, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok pro pemerintah ketika ada ancaman asing dan sanksi ekonomi justru semakin meningkat dibandingkan pada momentum-momentum lain seperti pemilihan umum atau paska usaha kudeta. Penerapan sanksi internasional justru digunakan pemerintah otoriter tersebut untuk membuat narasi melawan oposisi dan negara pemberi sanksi.¹⁹

Literatur kedua yang berjudul *Punishing Civilians: U.S Sanctions on Venezuela* oleh Mark Weisbrot dan Jeffrey Sachs menerangkan bahwa pihak utama yang dirugikan atas pemberlakuan sanksi AS terhadap Venezuela adalah masyarakat Venezuela sendiri, bukan rezim Maduro sebagaimana yang ditargetkan oleh AS. Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh AS berat bagi masyarakat Venezuela karena meskipun krisis ekonomi sudah ada sejak sebelum sanksi diterapkan, namun sanksi dan embargo membatasi pemulihan ekonomi Venezuela dari krisis. Venezuela benar-benar bergantung pada Rusia dan China untuk memenuhi kebutuhannya karena komoditas utama mereka yaitu minyak, tidak dapat membantu perbaikan ekonomi akibat adanya sanksi. Penerapan sanksi

¹⁹ Sebastian Hellmeier, "How Foreign Pressure Affects Mass Mobilization in Favor of Authoritarian Regimes", *European Journal of International Relations* (2020), diakses pada 26 Januari 2021, DOI: 10.1177/1354066120934527

yang cukup ketat tersebut berakibat pada peningkatan angka kematian dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat Venezuela.²⁰

Literatur ketiga yang berjudul *Venezuela's 2017 Crisis: A Failed Bolivarian Experiment or A Legitimate Claim of US Imperialism* oleh Paul Antonopoulos dan Drew Cottle menjelaskan mengenai tindakan AS terhadap krisis di Venezuela dan motivasi dibalik penetapan kebijakan yang tersebut. Sanksi ekonomi merupakan salah satu kebijakan AS yang dibahas dalam literatur ini. Penetapan sanksi yang dibahas membandingkan implementasi di Venezuela maupun Suriah, namun berbagai pihak dalam pemerintahan AS dan juga oposisi di Venezuela yaitu MUD mengatakan bahwa sanksi terhadap Venezuela terlalu ringan untuk mencapai tujuan AS yaitu menggulingkan pemerintahan Maduro. Sanksi yang ditetapkan tersebut cenderung mengarah pada individu tertentu karena adanya ketergantungan dalam sektor minyak oleh keduanya.²¹

Berdasarkan ketiga literatur tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan AS terhadap Venezuela saat ini yaitu sanksi ekonomi dan diplomatik bergantung pada dari sudut mana kita melihat. Penerapan sanksi berat jika dilihat dari sudut pandang masyarakat Venezuela, namun jika tujuan AS terhadap Venezuela itu adalah untuk menurunkan Maduro dari pemerintahan, maka sanksi sendiri pun belum cukup karena terbukti hingga saat ini Maduro belum turun dari pemerintahan padahal sanksi sudah ditetapkan semenjak tahun

²⁰ Mark Weisbrot dan Jeffrey Sachs, "Punishing Civilians: U.S Sanctions on Venezuela", *Challenge, Taylor and Francis Group online journal* (2019), diakses pada 26 Januari 2021, DOI: 10.1080/05775132.2019.1638094

²¹ Paul Antonopoulos dan Drew Cottle, "Venezuela's 2017 Crisis: A Failed Bolivarian Experiment or a Legitimate Claim of US Imperialism?", *Critique, Journal of Socialist Theory Vol. 46 No 1* (2018), diakses pada 26 Januari 2021, DOI: 10.1080/03017605.2017.1412621

2014. Penelitian ini setuju bahwa tindakan AS melalui sanksi ekonomi dan sanksi diplomatik memang tidak sekeras cara-cara yang diambil AS beberapa dekade lalu, yaitu dengan intervensi militer. Bukan kondisi damai yang terbentuk di Venezuela, namun tekanan internasional yang hanya di tetapkan oleh beberapa negara saja membuat rezim Maduro juga semakin otoriter dan pada akhirnya menggunakan berbagai cara untuk dapat menyelamatkan kedudukannya. Penelitian mencoba melihat meskipun tujuan AS untuk menurunkan Maduro belum terbukti berhasil, tentu ada motivasi-motivasi lain yang membuat AS tetap mempertahankan kebijakan tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Konsep krisis secara umum dalam Ilmu Hubungan Internasional tidak memiliki pedoman yang pasti karena fenomena krisis sendiri selalu berbeda-beda dan unik antara satu dengan yang lain. Perbedaan dalam setiap peristiwa membuat penelitian mengenai krisis dilakukan dengan berfokus pada satu kasus tertentu.²² Krisis kemanusiaan dapat didefinisikan sebagai situasi dimana penderitaan bagi banyak orang terjadi secara independen dan merupakan konsekuensi dari tindakan pemerintahan yang tidak disengaja. Krisis kemanusiaan akan selesai jika penyebab dari penderitaan tersebut dihilangkan. Caranya adalah dengan pemberian bantuan barang maupun jasa bagi mereka yang terpuruk atau jika penyebab krisis adalah terpecahnya pemerintah, maka pembangunan kembali struktur dan perbaikan mekanisme pemerintahan menjadi jalan keluar yang paling

²² Charles Hermann, "International Crisis as a Situational Variable" dalam buku *International Politics and Foreign Policy* Ed. James N. Rosenau (New York: Free Press, 1969), hlm 409-410, diakses pada 31 September 2020.

baik. Krisis kemanusiaan perlu ditangani dengan segera karena jika terlalu besar dapat menimbulkan banyak kerugian hingga perang saudara.²³

Konsep Krisis dalam Politik Internasional oleh Charles Hermann menggunakan 2 pendekatan yaitu sistemik dan pembuatan kebijakan. Meskipun pada awalnya pendekatan tersebut dibentuk pada level analisis di tingkat negara dan organisasi internasional, namun dapat pula digunakan untuk menganalisis di tingkat domestik sebuah negara mencakup provinsi, negara bagian, atau pun pemerintahan kota.²⁴ Dalam pendekatan sistemik, sistem didefinisikan sebagai gabungan beberapa aktor yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu pola dan struktur tertentu. Setiap aktor akan berusaha untuk mempertahankan pola dan struktur tersebut untuk menghindari de-stabilisasi. Krisis sendiri adalah suatu gangguan terhadap seluruh atau sebagian dari sistem. Krisis mengandung 2 elemen yaitu perubahan dan konflik. Seberapa parah krisis menimbulkan perubahan dan konflik tergantung pada variabel sistem yang mengalami de-stabilisasi.²⁵

Sementara itu, dalam pendekatan pembuatan kebijakan, krisis dilihat dari dampaknya bagi para pembuat kebijakan baik individu, kelompok, maupun institusi. Krisis dalam proses pembuatan kebijakan mengandung 3 karakteristik yaitu ancaman terhadap nilai dasar, adanya keterbatasan waktu, dan terjadi secara tiba-tiba (*surprise occurrence*). Krisis merupakan suatu stimulus yang harus diselesaikan oleh para pembuat kebijakan. Oleh karena karakteristik tersebut,

²³ Jack Donnelly, "Human Rights, Humanitarian Crisis, and Humanitarian Intervention", *International Journal XLVIII* (1993): 638-639, diakses pada 24 Oktober 2020.

²⁴ Eric Kevin Stern, "Crisis Studies and Foreign Policy Analysis: Insights, Synergies, and Challenges", *International Studies Review* (Oktober, 2003), 187, diakses pada 1 September 2020, doi: 10.1111/1521-9488.5020016.

²⁵ Hermann, *International Crisis*, 411-413.

pembuatan kebijakan terkadang mengeluarkan penyelesaian yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada karena terbatasnya informasi dan waktu yang dimiliki. Ketika kebijakan yang dihasilkan tidak maksimal, ada kecenderungan dari para pengambil keputusan untuk menarik aliansi dan dukungan dari kelompok-kelompok tertentu agar kebijakannya diterima.²⁶ Pembuatan kebijakan yang tidak tepat akan berujung pada krisis legitimasi yang menurut Jurgen Habermas terjadi akibat tidak terpenuhinya ekspektasi dari masyarakat terhadap pelaksanaan nilai dan besar upah yang diberikan baik dalam ekonomi maupun sosio-kultural²⁷.

Disamping dari segi politik, krisis juga berkembang dalam bidang ekonomi. Berdasar pemikiran Karl Marx, krisis dalam bidang ekonomi terjadi dalam 2 bentuk yaitu abstrak dan nyata. Krisis yang bersifat abstrak terjadi akibat tidak sejalannya proses penjualan dan pembelian komoditas serta berkurangnya fungsi uang sebagai alat pembayaran dalam perdagangan. Dalam perekonomian kapitalis, proses produksi harus menghasilkan barang yang memiliki nilai guna untuk dapat ditukar dalam bentuk uang. Uang itu sendiri nantinya digunakan kembali untuk ditukar terhadap komoditas lainnya, sehingga proses ekonomi berjalan Komoditas-Uang-Komoditas. Krisis terjadi apabila penjualan dan pembelian berjalan secara independen. Ada 2 kemungkinan yang terjadi yaitu komoditas yang dijual tidak mempunyai nilai guna atau tidak ada nilai guna tambahan yang bisa ditukar, sedangkan dari sisi pembelian, konsumen tidak memiliki barang atau uang yang dapat ditukarkan kembali dengan komoditas tersebut. Tidak adanya kemampuan konsumen untuk membayar maupun

²⁶ *Ibid*, 413-417.

²⁷ Jurgen Habermas, *Legitimation Crisis* (Cambridge: Polity Press, 1988), hlm 73, diakses pada 10 September 2020.

rendahnya nilai uang yang dibayarkan akan memengaruhi kemampuan produsen dalam menghasilkan komoditas berikutnya karena modal yang dimiliki menjadi terbatas.²⁸

Sementara itu dalam bentuk nyata krisis terjadi dengan indikasi adanya fluktuasi dan kenaikan harga komoditas yang tidak disertai dengan kenaikan nilai. Kondisi tersebut diperburuk bila uang tidak dapat dikonversikan kembali sebagai modal serta adanya perubahan nilai barang-barang modal terutama bahan baku.. Hasil penjualan pertama menghasilkan uang yang digunakan kembali sebagai modal reproduksi, oleh karena nilai uang yang dihasilkan tidak dapat dikonversikan kembali menjadi modal maka produsen harus bertahan pada kemampuan produksi awal menggunakan modal tetap dan tidak ada penambahan nilai produk. Hal ini juga berakibat pada eksploitasi pekerja yang dikarenakan terbatasnya modal dan penghasilan, mereka mendapat upah yang lebih rendah. Krisis ekonomi akan terus meningkat akibat adanya gangguan dalam proses penjualan serta terhambatnya proses konversi uang hasil penjualan ke dalam modal produksi yang punya nilai tambah.²⁹ Pada akhirnya, produsen akan berfokus pada perluasan margin keuntungan daripada kebutuhan pasar dan masyarakat.³⁰ Friedrich Engels menambahkan bahwa krisis ekonomi merupakan kondisi dimana ada *over-supply* dalam proses produksi namun masyarakat justru

²⁸ Karl Marx, *Theory of Surplus-Value Vol. IV of Capital Part II* (Moscow: Progress Publishers, 1968) hlm 507-514, diakses pada 4 September 2020.

²⁹ Marx, *Theory of*, 515-517.

³⁰ Reinhart Koselleck, Michaela Richter, "Crisis", *Journal of the History of Ideas Vol. 67, No.2* (April 2006): 396, diakses pada 2 September 2020, doi: 10.1353/jhi.2006.0013

kelaparan akibat dari surplus tersebut dan hal ini akan mengarah pada revolusi sosial yang belum pernah dibahas sebelumnya oleh ahli ekonomi mana pun.³¹

Krisis sosial menurut Jurgen Habermas merupakan kondisi ketika sistem sosial mengalami gangguan diantaranya karena struktur dalam sistem tidak bekerja secara berkesinambungan, terjadi disintegrasi sosial, melemahnya peran institusi sosial, serta menurunnya implementasi nilai dan norma sehingga masyarakat berada pada situasi tidak stabil, tidak terkontrol, dan teralienasi. Dapat dikatakan bahwa krisis sosial timbul sebagai akibat dari disrupsi dalam sub-sistem di dalamnya mencakup politik, ekonomi, dan sosio-kultural. Selain kondisi-kondisi yang disebutkan di atas, krisis dalam sistem sosial secara subjektif muncul karena adanya ancaman terhadap identitas masyarakat dan pengakuan dari masyarakat sendiri bahwa mereka sedang mengalami kondisi krisis.³²

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran utama dari teori Hubungan Internasional Mazhab Inggris yang merupakan jalan tengah menanggapi perdebatan antara teori realisme dan liberalisme. Tidak seperti teori realisme dan liberalisme, Mazhab Inggris melihat fenomena dalam hubungan internasional secara luas dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan adanya pola hubungan yang baru. Untuk memahami suatu isu diperlukan kajian yang menggabungkan teori dengan aspek sejarah, *power*, moral, dan juga hubungan antara agen-struktur.³³ Kerangka Pemikiran ini menggunakan pemahaman dari Hedley Bull dan Martin Wight.

³¹ *Ibid*, 393.

³² Habermas, *Legitimation Crisis*, 2-5.

³³ Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, *The English School in International Relations Theories: Discipline and Diversity Third Edition*, (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm132-149

Asumsi Mazhab Inggris dari Hedley Bull mengedepankan ketertiban internasional sebagai upaya untuk mencapai perdamaian. Ada 3 elemen yang diperkenalkan Bull sebelum masuk ke definisi ketertiban internasional yaitu negara, sistem internasional, dan masyarakat internasional. Sistem internasional merupakan kumpulan dari negara yang saling berkomunikasi dan memengaruhi satu sama lain sehingga ada dorongan untuk bertindak secara bersama-sama sebagai sebuah kesatuan. Sistem internasional terbentuk ketika interaksi antar negara disertai kalkulasi rasional untuk mengukur tindakan negara lainnya. Interaksi tersebut bisa berupa konflik, kerja sama, atau bahkan tidak keduanya (netral) dan dapat mencakup berbagai sektor seperti politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain.³⁴ Sementara itu, masyarakat internasional dapat didefinisikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki persamaan nilai, kepentingan, kebudayaan yang saling berinteraksi dan sepakat untuk mengikat diri ke dalam suatu perangkat aturan atau institusi.³⁵ Persamaan nilai, kepentingan, budaya, dan peradaban berkontribusi terhadap pembentukan aturan dan institusi bersama. Konsep masyarakat internasional ingin menunjukkan bahwa dunia ini tidak se-anarki yang dijelaskan oleh Realisme. Negara memiliki hati nurani untuk bertindak baik dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Di satu sisi, Mazhab Inggris melalui konsep ini juga mengingatkan Liberalisme bahwa dunia tanpa perang itu mustahil. Pembentukan pemerintahan dunia yang universal mungkin bisa terjadi tetapi bukan berarti perang itu harus dihindari. Bull menempatkan diri bahwa

³⁴ Hedley Bull, *The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, Third Edition* (New York: Palgrave, 2002), hlm 8-13.

³⁵ *Ibid.*

dunia ini tidak seburuk yang dipandang realisme, namun tidak se-sempurna yang dipandang liberalisme.³⁶

Ketertiban internasional (*international order*) adalah pola perilaku yang mendorong tercapainya tujuan bagi seluruh masyarakat internasional (*international society*). Tujuan tersebut dapat dibedakan menjadi tujuan yang sifatnya *elementary*, *primary*, dan universal. Tujuan *elementary* merupakan tujuan yang paling penting karena mendasari hampir seluruh aktivitas negara. Tujuan tersebut mencakup kebebasan dari ancaman fisik, menjamin perjanjian yang dibuat ditepati, dan menjamin pemenuhan kebutuhan terpenuhi secara berkelanjutan.³⁷ Ketiga hal tersebut merupakan landasan kuat bagi pembentukan masyarakat internasional karena persamaan tujuan antar negara lebih mengikat dan mempererat relasi mereka dibandingkan hanya sebatas persamaan budaya dan cara pandang atau ideologi.³⁸ Syarat agar ketertiban tersebut dapat bertahan adalah dengan adanya penegakan aturan, pembuatan institusi, dan kesamaan tujuan dari aktor-aktor yang terlibat untuk mempertahankan pola aktivitas yang sedang terjadi.³⁹

Berikutnya, penelitian jua mengelaborasi argumen Mazhab Inggris Klasik yang dikemukakan oleh Martin Wight dan Charles Manning. Berdasarkan pemahaman klasik, Wight dan Manning menggabungkan 3 teori dalam studi Hubungan Internasional yang disebut sebagai '*three traditions of IR Theory*' yaitu

³⁶ Kai Alderson dan Andrew Hurrell, *Hedley Bull on International Society*, (London: Macmillan Press, LTD, 2000,) hlm 10-11.

³⁷ Bull, *The Anarchical*, 5-8.

³⁸ Andrew Linklater, "The English School", dalam buku *Theories of International Relations Fifth Edition* oleh Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, et.al, (New York: Palgrave MacMillan, 2013) hlm 94-95.

³⁹ K.J Holsti, "Theorising the Causes of Order: Hedley Bull's The Anarchical Society" dalam buku *Theorising International Society: English School Methods* oleh Cornelia Navari, (London: Palgrave Macmillan, 2009) hlm 130-131.

mencakup Realisme oleh Hobbes/Machiavelli, Rasionalisme oleh Grotius, dan Revolusionisme oleh Immanuel Kant. Ketiga teori tersebut dijelaskan sebagai berikut.⁴⁰

1. Realisme berpegang pada asumsi bahwa hubungan antar negara berada dibawah kondisi anarki, dimana tidak ada kekuasaan politik di atas negara sehingga pola hubungan akan selalu diwarnai perang dan kompetisi. Hal ini dipicu karena dari mulanya manusia merupakan makhluk yang jahat. Manusia punya ambisi untuk menaklukkan yang lainnya. Realisme berbeda dengan rasionalisme dan revolusionisme yang melihat kondisi internasional di masa yang akan datang, asumsi realisme berasal dari peristiwa yang sudah terjadi. Realisme melihat fakta yang terjadi bukan menjelaskan kondisi ideal yang seharusnya terjadi.
2. Revolusionisme memiliki fokus pada kesatuan nilai/ ide / norma dalam suatu sistem. Inti dari revolusionisme adalah renovasi dan universalitas. Seperti halnya Revolusi Prancis sebagai contoh, kondisi awal digambarkan sudah mengalami kerusakan, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karena itu mereka menyuarakan reformasi dengan beralih ke nilai-nilai baru yang diakui bersama. Tidak selamanya reformasi berupa nilai baru, mereka bisa saja berangkat dari sisa-sisa nilai lama namun diterapkan dengan pembaharuan. Perdamaian dapat dicapai ketika hanya ada satu sistem nilai yang diakui bersama yang mereka sebut sebagai *world state*.
3. Rasionalisme merupakan teori yang percaya bahwa dalam setiap hubungan antar manusia memiliki nilai. Meskipun berada pada kondisi anarki,

⁴⁰ Martin Wight, Ed. Gabriele Wight and Brian Porter, *International Theory: The Three Traditions* (New York: Holmes and Meier, 1992), 8-24.

manusia memiliki rasionalitas sehingga setiap tindakannya selalu memiliki alasan dan tujuan tertentu. Terkadang manusia bisa menjadi jahat, tidak rasional, namun di lain waktu mereka dapat pula membangun kerjasama satu sama lain. Hal tersebut terjadi karena manusia dapat memilih tindakannya sesuai dengan konteks politik dan sosial yang dialaminya.

Menurut Wight, meskipun memiliki pandangannya masing-masing, ketiga tradisi tersebut dalam English School tidak bekerja secara paralel dan independen. Mereka saling berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Ketiga elemen tersebut selalu ada dalam sebuah fenomena hubungan internasional namun tradisi mana yang lebih mendominasi dapat berubah-ubah.⁴¹ Pada penelitian kali ini, penulis berfokus pada penggunaan realisme dan rasionalisme dimana pada intinya, perang adalah hal yang tidak dapat dihindari dengan cara apapun, namun walaupun perang dan anarki tidak dapat dihindari, ada kewajiban moral yang dapat membuat negara dalam bertindak memilih cara yang lebih “*lesser evil*”.⁴²

1.6 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.6.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif yaitu penelitian dengan tujuan mengetahui faktor kunci yang mempengaruhi suatu

⁴¹ *Ibid*, 259-267.

⁴² *Ibid*, 259.

fenomena.⁴³ Alat analisis kualitatif yang digunakan adalah *process tracing* yaitu proses pengumpulan fakta dalam periode waktu tertentu guna mendukung maupun menolak hipotesis yang ada. Penggunaan *process tracing* diantaranya dengan melihat satu per satu bukti dan menghubungkannya dengan fenomena yang diteliti. Bukti-bukti yang didapat meskipun merupakan bagian dari penelitian kualitatif tidak hanya berasal dari naskah tetapi juga dapat mengandung unsur numerik.⁴⁴ *Process tracing* digunakan dalam penelitian ini karena dapat menjelaskan mekanisme dan rangkaian sebab dalam suatu fenomena yang menghubungkan variabel dependen dan independen. Tidak hanya itu, proses ini juga mengaitkan fenomena yang diteliti secara luas termasuk melihat aspek historis serta ekspektasi teori yang dipakai melalui triangulasi data dari dokumen, wawancara, survei para ahli, bukti sejarah, hingga artikel media massa.⁴⁵

Penelitian kualitatif banyak dipakai dalam ilmu sosial karena menekankan pada interpretasi peneliti terhadap suatu fakta yang terjadi secara alamiah. Fakta tersebut didapat melalui sumber dokumen maupun pengamatan terhadap tingkah laku objek yang diteliti. Dalam melakukan interpretasi terhadap suatu fakta, penulis dapat dibantu dengan kerangka pemikiran dari teori, asumsi filosofis, dan pandangan umum (*worldviews*).⁴⁶ Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, dimana penelitian terhadap suatu isu dianalisis

⁴³ Umar Suryadi Bakry, *Metode Penelitian Hubungan Internasional: Bab IV Pertanyaan dan Desain Penelitian Hubungan Internasional*, halaman 100

⁴⁴ David Collier, Henry E. Brady, dan Jason Seawright, "Causal Inference: Old Dilemmas, New Tools" dalam Buku *Rethinking Social Inquiry Second Edition*, (Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 2010) hlm 201-203

⁴⁵ Jeffrey C. Teckel, "Chapter 8: Process Tracing" dalam buku *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide* Ed. oleh Audie Klotz dan Deepa Prakash (New York: Palgrave Macmillan, 2008) hlm 114-119.

⁴⁶ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 2nd Edition*, California: SAGE Publication Inc., 2007, 36-39.

dengan menggunakan satu atau lebih kasus dalam konteks tertentu.⁴⁷ Pelaksanaan metode penelitian tersebut dilakukan oleh penulis pertama-tama menjelaskan masalah yang terjadi berdasarkan fakta yang didapat terkait fenomena krisis yang terjadi di Venezuela serta data interaksi AS-Venezuela, kemudian analisis dikaitkan dengan situasi internasional maupun domestik yang mendorong terjadinya tindakan tersebut dengan menggunakan pandangan teori, dan terakhir mengambil kesimpulan.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berbasis dokumen dan internet. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari fakta melalui setiap bahan yang menyediakan informasi tentang fenomena sosial yang relevan dengan topik pembahasan. Proses pengumpulan data berbasis dokumen dilakukan dengan menggunakan dokumen primer dan sekunder berupa buku, artikel, koran, jurnal, dan media cetak lainnya. Sementara itu, penelitian juga didukung dengan proses pengumpulan data berbasis internet yaitu mencari data dan fakta melalui buku, jurnal, dan artikel dalam situs web. Seluruh data yang sudah dikumpulkan tidak semuanya akan dipakai, namun diseleksi sesuai dengan kebutuhan, dan dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi sesuai topik per sub-bab untuk memudahkan proses analisis.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, 73.

⁴⁸ Glenn Bowen, "Document Analysis as Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal* (Agustus 2009), diakses pada 27 Agustus 2020, doi: 10.3316/QRJ0902027

1.7 Sistematika Pembahasan

1.7.1 Bab I – Pendahuluan

Bab ini merupakan gambaran singkat alur penelitian yang akan dilakukan. Pertama-tama di bagian awal berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai interaksi AS dengan negara-negara kawasan pada umumnya. Perbedaan respon AS terhadap situasi krisis di Venezuela merupakan masalah utama dalam penelitian ini. Untuk mendukung topik yang diangkat, penulis sudah melakukan studi literatur dari 3 buah jurnal terkait efektivitas sanksi ekonomi dan diplomatik. Masalah dalam penelitian ini akan dikaji menggunakan kerangka pemikiran utama Mazhab Inggris dan dibantu dengan penggunaan konsep krisis untuk menjelaskan situasi di Venezuela. Pada bab ini juga dijelaskan metode penelitian yang dipakai yaitu kualitatif deskriptif dan serta teknik pengumpulan data yaitu dengan analisis dan mengaji dokumen melalui internet.

1.7.2 Bab II – Krisis Kemanusiaan di Venezuela dan Posisi Serta Tanggapan AS Terhadap Situasi Domestik Venezuela

1.7.2.1 Krisis Kemanusiaan di Venezuela

1.7.2.1.1 Instabilitas Politik: Penyalahgunaan Konstitusi dan Monopoli Kekuasaan oleh Maduro dan Militer.

1.7.2.1.2 Intrusi Sistem Ekonomi: Inflasi dan Ketidakseimbangan Produksi-Konsumsi Dalam Perdagangan.

1.7.2.1.3 Krisis Sosial sebagai Dampak Situasi Politik-Ekonomi

1.7.2.2 Posisi Serta Tanggapan AS Terhadap Situasi Domestik Venezuela

1.7.3 **Bab III – Faktor-Faktor Yang Membuat AS Tidak Menggunakan Intervensi Militer Dalam Penyelesaian Krisis di Venezuela**

1.7.3.1 Amerika Latin: Keinginan Bebas dari AS *Versus* Kebutuhan Terhadap AS

1.7.3.2 Implementasi Prinsip Non-Intervensi, Otonomi, dan Kedaulatan Negara

1.7.3.3 Perubahan Dinamika Kawasan Mendorong Perubahan Sikap AS Terhadap Amerika Latin dan *Great Powers* Lainnya

1.7.4 **Bab IV Kesimpulan**

Bab ini menemukan ide atau pemahaman baru yang didasarkan pada data dan hasil analisis yang sudah dilakukan guna menjawab pertanyaan penelitian.